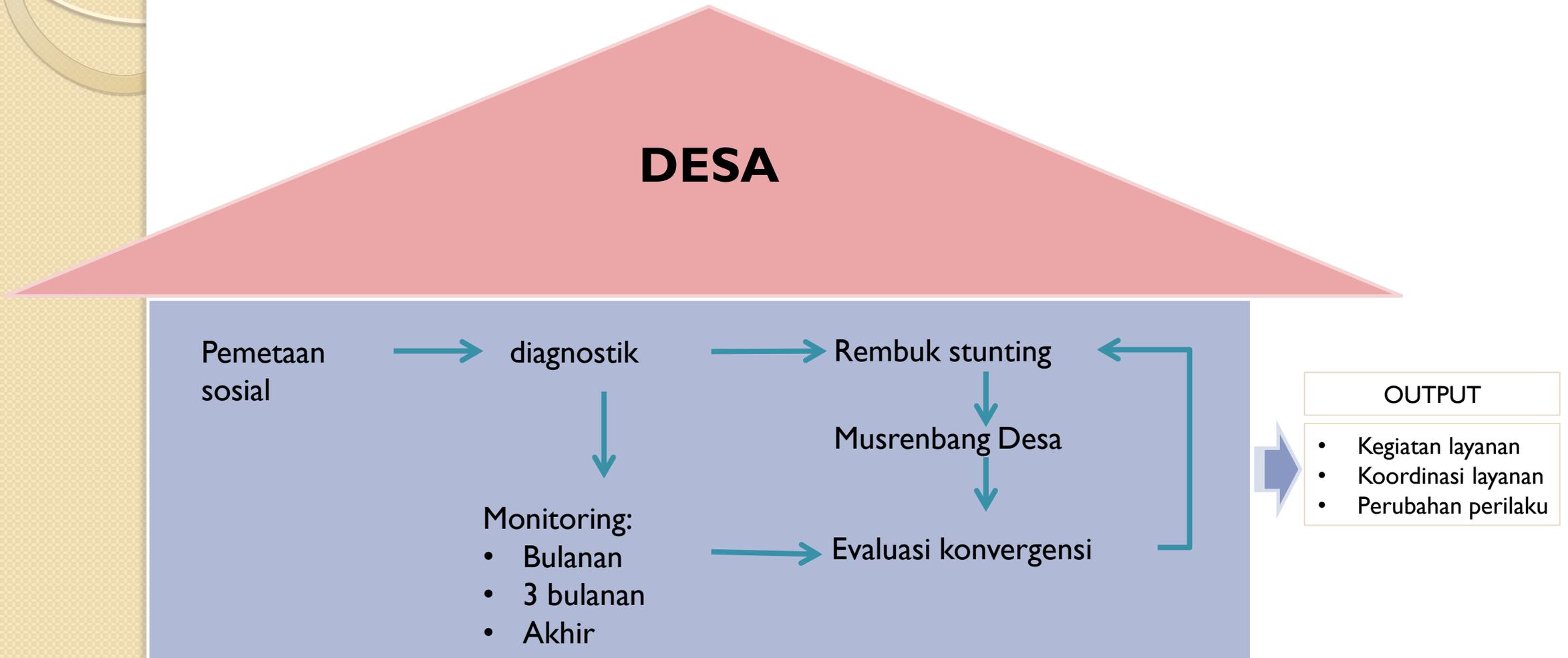


# KOLABORASI PSDM DGN DESA SIAGA



**PSDM**

# Siklus Fasilitasi Konvergensi Stunting Desa



# Pemenuhan 5 Paket Layanan Kegiatan Konvergensi *Stunting*



- ✓ Kelima paket layanan ini dilakukan oleh beberapa pelaksana
- ✓ Menjadi penting untuk dibangun koordinasi antar penyedia layanan, untuk memastikan:
  - Seluruh sasaran 1000 HPK mendapatkan layanan tanpa terkecuali
  - Layanan tersedia secara terstandar.
  - Adanya pemantauan terhadap pelaksanaan layanan
- ✓ Aktivitas konsolidasi dan koordinasi lintas pelaku peduli permasalahan stunting di Desa dilakukan melalui wadah RDS

# Rumah Desa Sehat (RDS)

## Pembentukan dan Penetapan

- RDS berkedudukan di Desa. Setiap Desa di kabupaten/kota lokasi prioritas pencegahan *stunting* diharapkan membentuk RDS. RDS dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Desa, anggota RDS yang berasal dari unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa. Pembentukan RDS ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.

## Fungsi

1. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
2. Ruang literasi kesehatan di Desa.
3. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
4. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
5. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

# KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

## HUMAN DEVELOPMENT WORKERS (HDW)

- **KPM** adalah kader di Desa yang dipilih & ditetapkan melalui Musdes serta telah mendapatkan Bantuan Insentif Bulanan dari APBDesa T.A. 2019.
- Minimal terdapat 1 orang KPM di Desa-Desa yang menjadi lokasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM).
- KPM memiliki peran **memastikan tersedianya kegiatan pelayanan sosial dasar bidang kesehatan dan pendidikan di Desa**, serta memastikan masyarakat, terutama **Ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (Baduta)** memperoleh layanan tersebut secara konvergen (terpadu).

### KPM bertugas:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini *stunting* dengan tingkat pertumbuhan;
2. Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD);
3. Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk intervensi *stunting*;
4. Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan konvergensi lima paket layanan pada rumahtangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menerima dan melaporkan hasilnya;
5. Bekerjasama dengan PLD, PD dan TPID dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan *stunting*;
6. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka *capturing* awal.

# DESA SIAGA

# Alur Konvergensi Dalam Pemecahan Masalah di Desa



# Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 56 Tahun 2011 Ttt Pengembangan Desa Siaga Di Kabupaten Gunungkidul

## Desa siaga

adalah wadah **integrasi pembangunan kesehatan masyarakat** di tingkat desa yang masyarakatnya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan dan kemauan untuk **mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan**, **kegawatdaruratan** dan **bencana** secara mandiri

### Forum Desa Siaga

merupakan wadah koordinasi pembangunan kesehatan masyarakat desa dan pengelola program Desa Siaga di tingkat desa

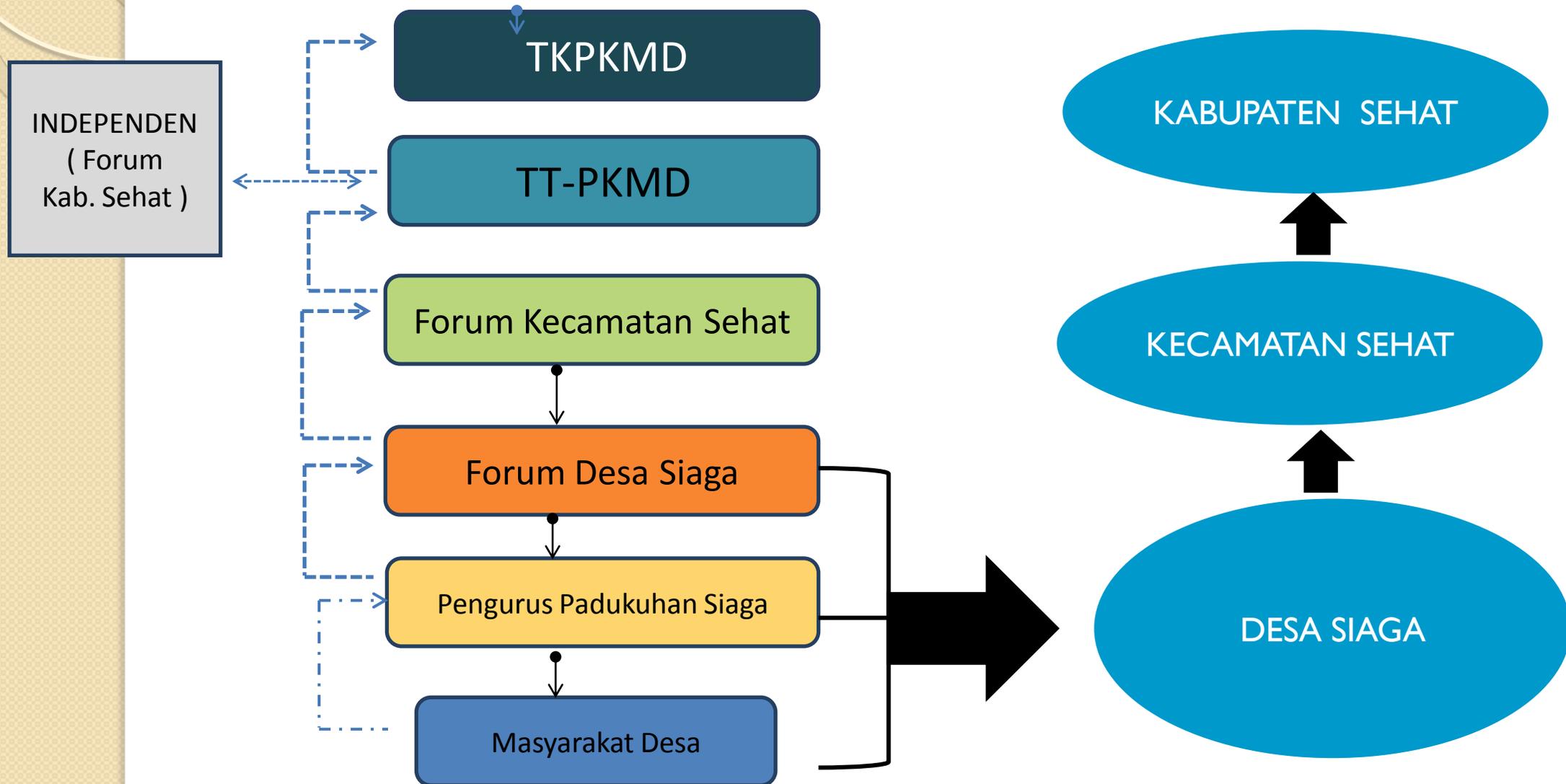
terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga di tingkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelolaan desa siaga

### Pengurus Padukuhan Siaga

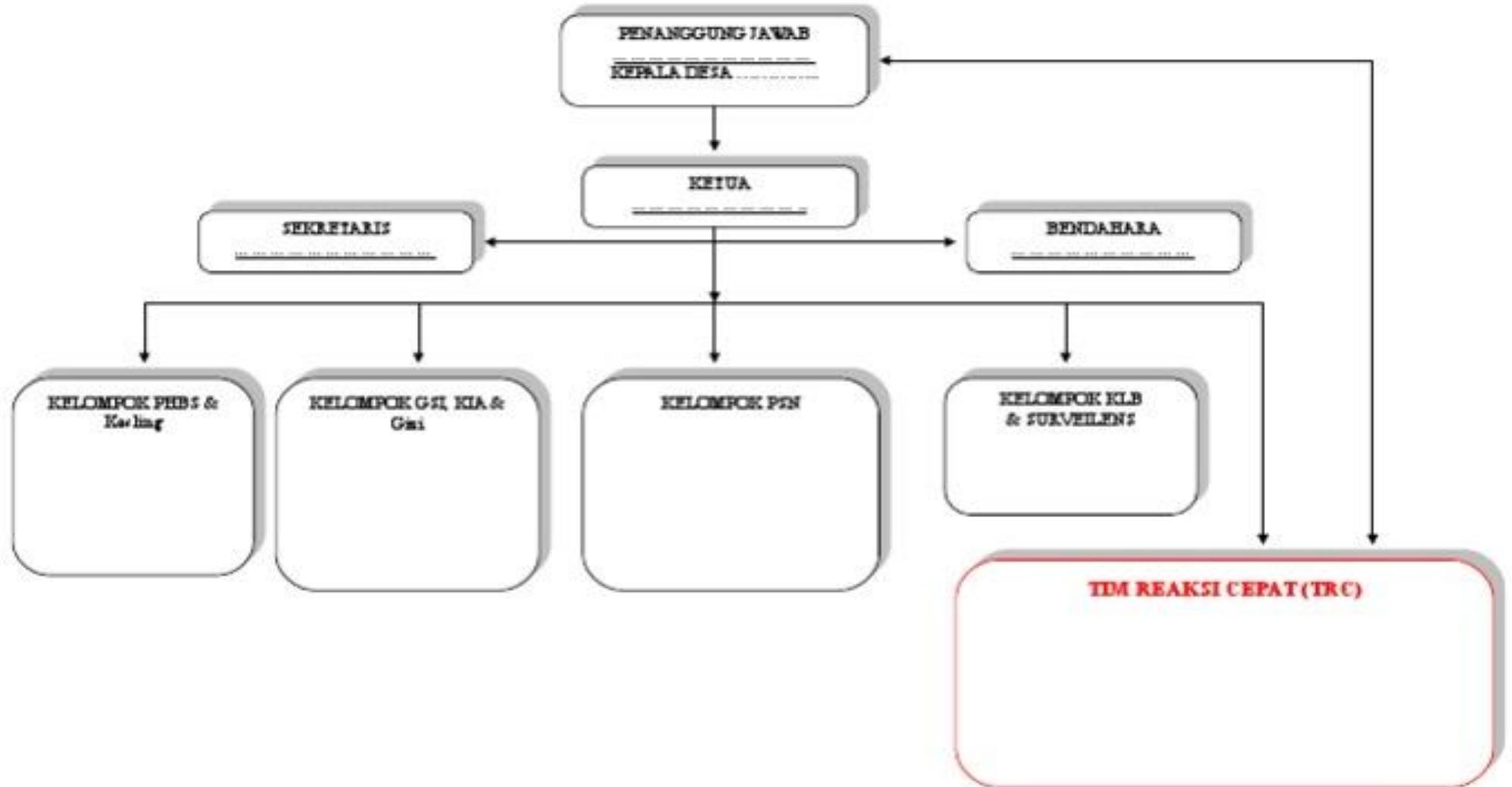
merupakan merupakan pelaksana Program Desa Siaga ditingkat padukuhan.

Terdiri dari Dukuh, Kader dan Masyarakat

- **BAGAN ORGANISASI PENGEMBANGAN DESA SIAGA**
- **KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**STRUKTUR ORGANISASI DESA SIAGA DESA .....**



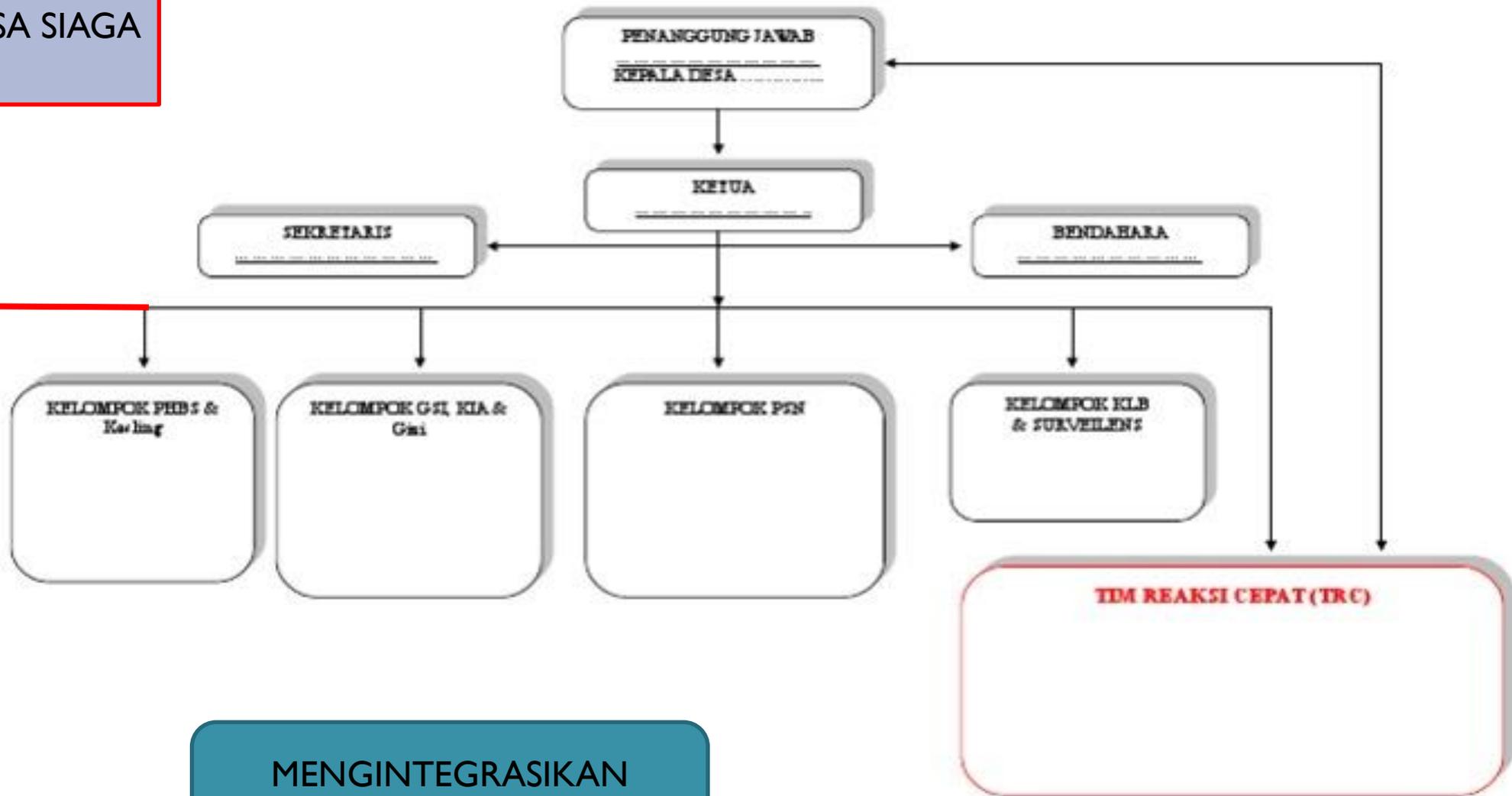
# **DESA SIAGA & PSDM**

## Menyelaraskan Tahapan (Desa Siaga=PSDM)

- Identifikasi Masalah  $\approx$  Pemetaan Sosial
- Identifikasi & Pemecahan Masalah  $\approx$  Diagnostik
- Forum Desa Siaga  $\approx$  Rembug Stunting
- **Musrenbangdes**
- **RKP DESA**

# STRUKTUR ORGANISASI DESA SIAGA DESA .....

**SK**  
PENGURUS DESA SIAGA

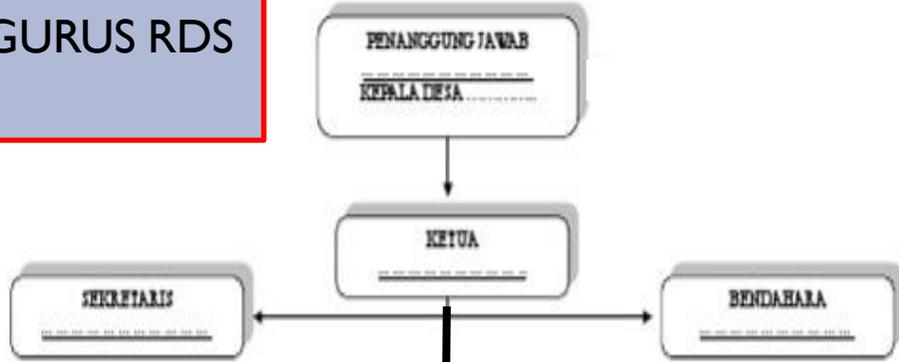


**RDS**

- Ketua (1)
- Sekretaris (1)
- Bendahara (1)
- Anggota (2)
- (5 orang)

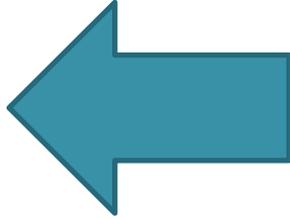
MENGINTEGRASIKAN  
DENGAN PERBUB 61 / 2018

**SK**  
PENGURUS RDS

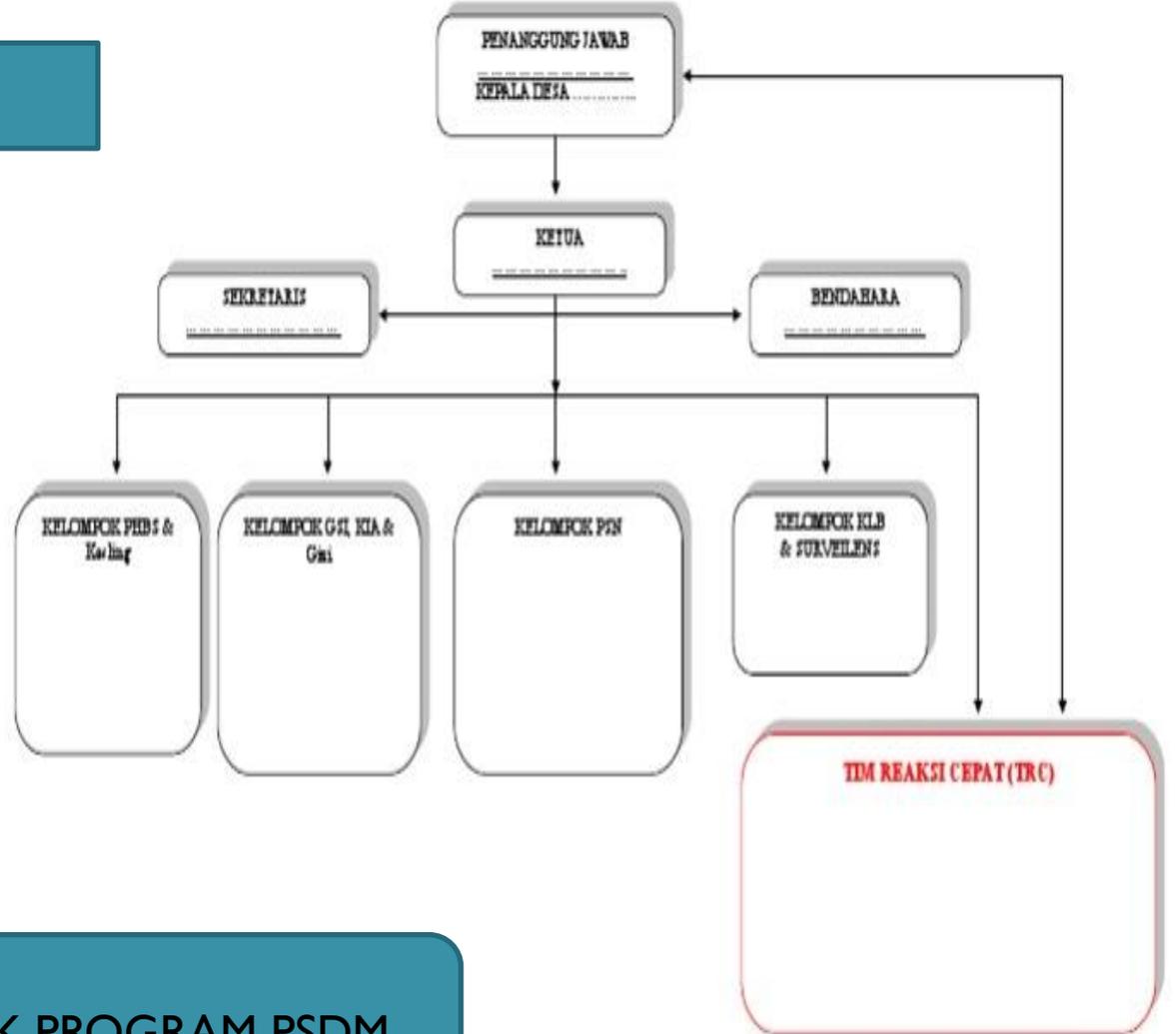


**RDS**

- Ketua (1)
- Sekretaris (1)
- Bendahara (1)
- Anggota (2)
- (5 orang)



STRUKTUR ORGANISASI DESA SIAGA DESA .....



UNTUK PROGRAM PSDM

# Pertanyaan:

- Adakah ketentuan dalam Perbub 56/2011 menyediakan penambahan struktur organisasi dalam Desa Siaga?
- Adakah Nomer Rekening Anggaran dalam APBDes, dapat mengakimodir RDS dan KPM ?
- Ketika RDS tidak menjadi bagian Desa Siaga, bagaimana tahapan dapat dikawal kader yang saling bersinggungan?
- Ketika RDS menjadi bagian Desa Siaga, apakah tahapan PSDM dapat dijalankan dan laporan konvergensi stunting dapat diperoleh?
- Bagaimana “post program” PSDM, antara bagian Desa Siaga dan bukan bagian Desa Siaga? (didekati dari peran kader dan kelembagaan)
- Desa Siaga masih mendasarkan pada UU 32 Tahun 2004; perlukah revitalisasi dengan perubahan mendasarkan pada UU 23/2014 dan UU 6/2014 ? ; atau diperlukan regulasi baru khusus stunting ?

# **KODE & JENIS BELANJA DESA SIAGA & PSDM**

# Pemenuhan 5 Paket Layanan Kegiatan Konvergensi *Stunting*



- ✓ Kelima paket layanan ini dilakukan oleh beberapa pelaksana
- ✓ Menjadi penting untuk dibangun koordinasi antar penyedia layanan, untuk memastikan:
  - Seluruh sasaran 1000 HPK mendapatkan layanan tanpa terkecuali
  - Layanan tersedia secara terstandar.
  - Adanya pemantauan terhadap pelaksanaan layanan
- ✓ Aktivitas konsolidasi dan koordinasi lintas pelaku peduli permasalahan stunting di Desa dilakukan melalui wadah RDS

# SE Bupati RKP Desa 2020 *(hal. 9)*

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
  - a. Operasional Forum Desa Siaga.
  - c. Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
  - d. Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
  - e. Insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
  - f. Pemberian stimulan jamban sehat minimal 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga dan/atau Stimulan Bedah Rumah minimal untuk 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga. *(Prioritas Jamban Sehat Lokasi Sasaran 1.000 HPK)*
  - h. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
  - j. Operasional Rumah Desa sehat (PID PSDM).

# **Menu Inovasi Bursa B**

## **SAJIAN INOVASI SUMBER DAYA MANUSIA**

- B1. Peran Aktif Wali Murid Dalam Pengelolaan Makanan untuk Siswa PAUD**
- B2. Harapan Yang Telah Tiba: Pengelolaan Pendidikan PAUD Inklusi**
- B3. Mengajarkan Kepedulian Terhadap Lingkungan Pada Anak Usia Dini**
- B4. Pelayanan PAUD Gratis**
- B5. Pos Gizi Ibu Hamil Untuk Penanganan Stunting**
- B6. Dana Desa Sebagai Dana Posyandu untuk Masyarakat**
- B7. Memutuskan Rantai Kematian Ibu melalui Program Ronda Ibu Hamil**
- B8. Kiat Jitu Posyandu**
- B9. Menikmati pelayanan POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu) Berbayar Sampah**
- B10. Menebar Bahagia di Pagi Bukit Sari: Strategi Pembinaan Posyandu Jemput Bola**
- B11. Produktif Diusia Senja Pemberdayaan Lansia**
- B12. Desa Siaga Sosial**
- B13. Pemuda Pelestari Seni Tradisional**
- B14. Perpustakaan Desa Bale Catur "Sumber Ilmu"**
- B15. Kelompok Pendukung Ibu Dalam Usaha Pencegahan Stunting**
- B16. Perempuan Yang Berkarya Guna dan Berdaya Guna Dusun Gatak Desa Karangmojo**
- B17. Posyandu Yang Terpadu**

**KODE & JENIS BELANJA (KEGIATAN)  
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan (PAUD)</b>
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	90	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa
2	1	91	pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa

**KODE & JENIS BELANJA (KEGIATAN)  
 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

KODE & JENIS BELANJA (KEGIATAN)  
 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
2	2	91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
2	2	92	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
2	2	93	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
2	2	94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
2	2	95	Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
2	2	96	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
2	2	97	Surveilans berbasis masyarakat
2	2	98	Insentif kader kesehatan/KB
2	2	99	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)

LAMPIRAN : PERBUB NO 61 TH 2018 ttg PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KODE & JENIS BELANJA (KEGIATAN)  
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>91</b>	<b>Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat</b>

# PEMBIAYAAN RDS DAN KPM

## Penganggaran RDS :

<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>

## Penganggaran KPM :

<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>91</b>	<b>Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat</b>

**Tabel IV.1:**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA**

Tahun : 201..... - 201.....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....

No.	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (juta rupiah)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan (juta rupiah)		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jml (Rp.)	Sumber	Swakelola/ K.A.Desu/ K. P. Ketiga
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
Jumlah Per Bidang 1								Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml		
2.	Pembangunan Desa															
Jumlah Per Bidang 2								Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml		
3.	Pemberdayaan Masyarakat															
Jumlah Per Bidang 3								Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml		
4.	Pembinaan Masyarakat															
Jumlah Per Bidang 4								Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml		
<b>JUMLAH TOTAL</b>								Pagu 1 th	Pagu 1 th	Pagu 1 th	Pagu 1 th	Pagu 1 th	Pagu 1 th	Jml Pagu Desa 6 th		

# XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN : .....

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
Jumlah Per Bidang 1								-					
2	Pembangunan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
		h.											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
Jumlah Per Bidang 3								-					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4													
JUMLAH TOTAL								-					

Mengetahui :  
Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal, ....., ....., ....., .....,  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

# MANAJEMEN DATA KONVERGENSI STUNTING

- FORMULIR 4. (SCORECARD KONVERGENSI DESA)
- DATA STUNTING DESA

- FORMULIR 3.A. REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN 3 (TIGA) BULANAN BAGI IBU HAMIL
- FORMULIR 3.B REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN 3 (TIGA) BULANAN BAGI ANAK 0-2 TAHUN

- FORMULIR 1. PENDATAAN KONDISI LAYANAN DAN REKAPITULASI STATUS SASARAN
- FORMULIR 2.A. PEMANTAUAN BULANAN IBU HAMIL
- FORMULIR 2.B. PEMANTAUAN BULANAN ANAK 0-2 TAHUN
- FORMULIR 2.C. PEMANTAUAN LAYANAN DAN SASARAN PAUD ANAK 2 – 6 TAHUN

PUSKESMAS

PAUDIN

PEMERINTAH DESA

PENDAMPING DESA

DESA SIAGA RDS

KPM



KELOMPOK SASARAN 1.000 HPK



**TERIMA KASIH**

# PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN/ KOTA

KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JL. TAMAN SUROPATI NO. 2  
MENTENG JAKARTA PUSAT 10310



# 8 (delapan) Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi:

1. Analisis Situasi Program Penurunan Stunting
2. Penyusunan Rencana Kegiatan
3. Rembuk Stunting
4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
6. Sistem Manajemen Data Stunting
7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting
8. Reviu Kinerja Tahunan

# Pemetaan Kegiatan Sektor atau OPD Terkait dalam Percepatan Penurunan Stunting:

INSTANSI	KEGIATAN TERKAIT PENURUNAN STUNTING
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat.</li><li>❖ Pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat.</li><li>❖ Pembinaan pencegahan stunting.</li><li>❖ Pelaksanaan strategi promosi kesehatan.</li><li>❖ Peningkatan surveilans gizi.</li><li>❖ Penguatan intervensi Suplemasi Gizi pada ibu hamil dan balita.</li><li>❖ Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).</li><li>❖ Penyediaan makanan bagi Balita kurang gizi.</li><li>❖ Suplemasi Gizi Mikro.</li><li>❖ Pembinaan dan peningkatan persalinan di Fasilitas Pelayan Kesehatan.</li><li>❖ Pembinaan pelaksanaan STBM.</li><li>❖ Layanan pengendalian penyakit Filiariasis dan Kecacingan.</li></ul>

(lanjutan)

INSTANSI	KEGIATAN TERKAIT PENURUNAN STUNTING
Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).</li><li>❖ Kawasan Mandiri Pangan</li></ul>
Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pemasaran dan Promosi hasil kelautan dan perikanan.</li></ul>
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Sanitasi Pedesaan Padat Karya.</li><li>❖ Pamsimas/SPAM pedesaan.</li></ul>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Penyelarasan PAUD.</li><li>❖ Kelas Parenting.</li><li>❖ Penguatan usaha kesehatan sekolah (UKS).</li><li>❖ Bantuan sanitasi sekolah.</li></ul>
Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Peningkatan Promosi 1.000 HPK.</li></ul>
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Sosialisasi Gizi Seimbang, ASI, Pembatasan GGL, Kesehatan Reproduksi, dan Bahaya merokok bagi anak dan keluarga.</li></ul>

(lanjutan)

INSTANSI	KEGIATAN TERKAIT PENURUNAN STUNTING
Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Family Development Sesion (FDS) pada PKH.</li><li>❖ KPM yang mendapat bantuan sosial.</li></ul>
Agama	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Bimbingan perkawinan – pra nikah.</li><li>❖ Pembinaan keluarga sakinah.</li></ul>
Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, NIK).</li></ul>
Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan.</li></ul>
Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan.</li></ul>
Pengawasan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pengawasan produk pangan fortifikasi .</li><li>❖ Desa Pangan Aman.</li></ul>
Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Kampanye nasional terkait <i>stunting</i>.</li></ul>
Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pemanfaatan dana desa.</li></ul>

(lanjutan)

INSTANSI	KEGIATAN TERKAIT PENURUNAN STUNTING
Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Koordinasi penganggaran kegiatan percepatan penurunan stunting.</li><li>❖ Pengutan koordinasi perencanaan percepatan penurunan stunting.</li><li>❖ Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan stunting.</li></ul>



Sumber : Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota, BPPN, 2019